

**PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN KARO**

Vegita Br Tarigan¹, Menanti Sembiring², Benni Purba³

^{1,2,3}Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan jumlah populasi pelaku usaha sebanyak 10.440, dan yang menjadi sampel dari jumlah populasi berjumlah 99 pelaku usaha. Pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo di Bidang UKM dan Masyarakat sebagai Pelaku Usaha, serta Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo sudah baik. Hal ini dapat dilihat darjumlah pelaku usaha dari tahun ke tahun, pelaku usaha juga merasakan bahwa usaha yang mereka jalankan berkembang, keembagaan juga ikut memfasilitasi para pelaku usaha, perlindungan usaha yang diberikan sudah mampu menjamin bagi pelaku usaha sehingga pengembangan UKM akan lebih meningkat, dan dalam akses pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha sudah baik namun belum cukup optimal dalam upaya pengembangan UKM.

Kata Kunci: Pengembangan Usaha Kecil Menengah

***THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF MANPOWER, COOPERATIVES AND SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
BUSINESS IN KARO DISTRICT***

ABSTRACT

This research was conducted at the Office of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Karo Regency. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Karo Regency in the Development of Small and Medium Enterprises in Karo Regency. This type of research is qualitative research. With a population of 10,440, and a sample of the total population of 99 business actors. The data collection used is data obtained from interviews with employees of the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Karo Regency in the SME and Community as Business Actors, as well as Observation and Documentation. The results of this study indicate that the development of SMEs in Karo Regency is good. This can be seen from the number of business actors from year to year, business actors also feel that the business they run is growing, pride also facilitates business actors, the business protection provided has been able to guarantee for business actors so that the development of SMEs will be further increased, and access to financing provided to business actors is good but not optimal enough in the effort to develop SMEs.

Keywords: Small and Medium Enterprise Development

PENDAHULUAN

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam pemberdayaan UKM di Kabupaten Karo. Tujuan pemberdayaan yang dilakukan adalah guna mencapai terwujudnya UKM yang berdaya saing tinggi dalam rangka

meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Karo. Dalam mewujudkan UKM yang berdaya saing tinggi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo melakukan pelatihan, pendataan UKM, dan pembiayaan.

Untuk UKM di Kabupaten Karo, dalam kegiatan usaha tersebut masih banyak pelaku

usaha yang belum berkembang atau pun memahami bagaimana cara dalam mengelola UKM tersebut. Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya peningkatan pengembangan UKM yaitu: Pada tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan pelatihan terhadap pelaku usaha di bidang kemitraan dan kewirausahaan di Kabupaten Karo, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM berperan aktif mencari tahu kendala-kendala pengembangan UKM di Tanah Karo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar jumlah UKM yang Terdaftar Di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karo Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah UKM
1	2018	4760
2	2019	4989
3	2020	9673
4	2021	10440

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan jumlah UKM yang terdaftar dari tahun ke tahun, dari daftar usaha tersebut banyak jenis usaha yang dijalankan seperti kuliner, kerajinan tangan, otomotif dan sebagainya. Keberadaan UKM di Kabupaten Karo tentunya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, dengan UKM yang berkembang juga akan mendorong kemajuan yang besar di Kabupaten Karo.

Perkembangan yang terjadi pada UKM juga didorong dengan adanya peran Pemerintah serta Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karo, peran penting Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentunya untuk memberikan pelayanan dan kepuasan untuk pelaku UKM. Adanya peningkatan yang terjadi pada UKM tentunya berdampak positif jika dikelola dengan baik. Banyak UKM yang berkembang dan bertambah, namun tidak sedikit juga

UKM yang terdaftar tidak berkembang bahkan tidak aktif.

Tabel 2. Daftar jumlah peserta UKM yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi dan terhitung aktif, dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo.

No	Tahun	Jumlah
1	2018	50
2	2019	195
3	2020	68
4	2021	189

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta UKM yang aktif dari tahun 2018-2021, tidak sebanding dengan jumlah peserta UKM yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo. Hal ini menjadi salah satu masalah yang membuat UKM di Kabupaten Karo sulit berkembang.

Permasalahan UKM yang sering di hadapi adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai informasi, kurangnya keahlian dan kualitas SDM yang tidak memadai dan kemampuan teknologi. Kekurangan atau kelemahan yang sering terjadi pada UKM karena pola pikir masyarakat yang belum bisa mencerna bagaimana pentingnya pelatihan-pelatihan yang diberikan, masih beranggapan bahwa UKM akan berkembang tanpa harus didasari dengan pengetahuan yang cukup, karena masyarakat masih bergantung pada lingkungan sekitar atau alam.

Dalam upaya peningkatan pengembangan UKM di Tanah Karo untuk kelembagaan yang ikut ambil bagian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada pada bidang IKM (Industri Kecil Menengah), dengan adanya kelembagaan tersebut tentu akan sangat membantu terhadap pengembangan UKM yang ada di Tanah Karo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Karo? Apa saja Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Karo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karo melalui Peran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:126), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Berdasarkan pengertian serta judul penelitian, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta UKM yang ada di Tanah Karo yang berjumlah 10.440 peserta usaha. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 pelaku usaha yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin.

Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan untuk melakukan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Menurut Neuman (2018:186) , triangulasi merupakan ide untuk melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang yang dapat meningkatkan keakuratan data. Triangulasi terbagi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi ukuran
Triangulasi ukuran merupakan teknik yang mengambil beberapa pengukuran untuk fenomena yang sama seperti: frekuensi, intensitas dan lain-lain. Contoh pelaksanaannya seperti membuat kuisioner dengan jawaban pilihan ganda, dan melakukan wawancara terbuka.
2. Triangulasi pengamat
Triangulasi pengamat berarti melakukan wawancara pada sumber serta melakukan pengamatan dalam berbagai peristiwa atau perilaku. Membuat beberapa objek yang berbeda untuk diawasi dan di evaluasi.
3. Triangulasi teori
Triangulasi teori membutuhkan penggunaan presfektif teoritis majemuk untuk merencanakan suatu penelitian dan biasanya triangulasi ini akan membentuk asumsi dan konsep. Membandingkan cara feminis, fungsional dan teori interaksi simbolis menjelaskan bentuk, penyebab dan hasil sosial.
4. Triangulasi metode
Triangulasi metode merupakan teknik yang membaurkan kedua pendekatan dan data kuantitatif dan kualitatif.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi pengamat. Triangulasi pengamat, adanya pengamat di luar peneliti turut memeriksa hasil pengumpulan data. Melakukan wawancara kepada peserta usaha UKM serta melakukan pengamatan dalam setiap peristiwa atau perilaku peserta usaha UKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Dengan Informan

Hasil penelitian berupa kutipan wawancara menjelaskan jawaban informan mengenai peran dan pengembangan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo.

Hasil Wawancara Dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo tentang Peran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo

Pengembangan UKM sangat penting bagi pelaku usaha, dalam pengembangannya tentu harus dibantu. Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan UKM yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Ester Lea Br Barus selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro. Yang menerangkan bagaimana peran dan pengembangan serta kelembagaan dalam pengembangan UKM.

“UKM yang terjadi di Kabupaten Karo dapat dikatakan mengalami pengembangan hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Begitu Juga kendala yang kami hadapi saat ingin memberikan wawasan yang luas kepada pelaku usaha, karena banyak pelaku usaha masih belum mau mengikuti pelatihan maupun sosialisasi yang kami adakan. Begitu pula dengan kelembagaan yang bekerja sama dengan kami juga masih sangat terbatas melihat perbandingan jumlah dari pelaku UKM yang terdaftar namun masih masih mampu mengendalikan keadaan UKM di Kabupaten Karo”.(wawancara pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.43 WIB)



Gambar 1. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Ester Lea Br Barus Selaku Kasi di Bagian UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo. Pada Tanggal 24 Mei 2022 Pukul 14.43 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pengembangan UKM di Kabupaten Karo sudah mengalami pengembangan dari tingkat jumlah yang mendaftar, namun masih mengalami kendala dalam pengadaan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha.

Hal yang sama di ungkapkan pula oleh Ibu Minar Batubara selaku Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro. Yang menerangkan masalah perlindungan usaha dan akses pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha.

“Banyak pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya ke Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah pada bagian UKM tapi hanya untuk sekedar mendaftar saja” . Namun untuk perlindungan usaha yang dapat kami berikan kepada pelaku usaha hanya dalam bentuk Undang-Undang secara umum. Klasifikasi perlindungan yan dapat kami berikan seperti pembuatan NIB, PIRT dan sebagainya. Untuk akses pembiayaan secara langsung atau modal yang diberikan kepada pelaku masih terbatas, pengganti untuk pembiayaan kami memberikan alat- alat untuk penunjang para pelaku usaha, tetapi kategori yang mendapatkan bantuan berupa alatpun masih sangat terbatas. (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 15.59)



Gambar 2. Dokumentasi saat Wawancara dengan Ibu Minar Batubara Selaku Kasi di Bagian UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo. Pada Tanggal 24 Mei 2022 Pukul 15.59 WIB.

Berdasarkan ungkapan diatas, terlihat bahwa sebenarnya dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar masih banyak

pelaku usaha yang hanya ikut mendaftar namun dalam proses menjalankan atau ikut berpartisipasi dalam latihan dan sosialisasi yang diberikan masih kurang. Untuk peran yang Diberikan Oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah belum bisa membuat keadaan mensejahterakan masyarakat dalam menjalankan UKM, masih kurangnya fasilitas yang diberikan kepada pelaku UKM terkhusus pada pembiayaan, perlindungan dan kelembagaan yang ikut membantu.

Hasil Wawancara Dengan Pemilik UKM (Pelaku Usaha)

1. Pengembangan UKM

Pengembangan UKM sangat penting terhadap keberlangsungan bagi pelaku usaha. Namun masih banyak yang menjadi kendala dari masing-masing pelaku usaha. Dapat dilihat dari wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada pelaku usaha yaitu Bapak Waldi Sembiring (kopi/Dokan).

“Pengembangan UKM yang saya jalankan mungkin mengalami perkembangan, namun perkembangan dalam usaha saya belum bisa bertahan karena beberapa kendala atau situasi yang saya alami.”



Gambar 3. Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Waldi Sembiring, selaku pelaku usaha Kopi Dokan, Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 12.42

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pengembangan yang terjadi pada usaha yang dijalankan dapat berkembang namun terkendala pada pelaku usaha itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh salah seorang pelaku usaha, Bapak Sastrawan Sembiring (Kuliner Sinar Sembiring/Kabanjahe).

“Untuk UKM yang saya jalankan dapat dikatakan mengalami pengembangan namun pengembangan yang terjadi pada usaha saya berjalan secara bertahap bisa dikatakan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai pada saat ini”

Dari penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat Ibu Herlina Br Perangin-angin (Ribu Herbal/Kabanjahe)

“pengembangan untuk usaha yang saya jalankan sudah cukup berkembang karena adanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karo, seperti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan cukup rutin.”

Berdasarkan wawancara dengan ketiga pelaku usaha di atas, bahwa setiap usaha yang dijalankan sudah mengalami perkembangan/pengembangan yang dibantu oleh adanya peran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masing-masing UKM yang ada.

1. Kelembagaan

Untuk kelembagaan yang ikut berperan dalam pengembangan UKM di Kabupaten Karo sudah ikut membantu pelaku usaha, kelembagaan yang sudah memberikan beberapa fasilitas kepada pelaku usaha. Dapat dilihat dari jawaban wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hamzah Haloho (Rizki Telor Asin/Desa Bandar Tongging Merek).

“kelembagaan yang ikut dalam pengembangan UKM yang saya jalankan berperan dan memfasilitasi namun menurut saya akan lebih baik jika kelembagaan yang ikut berperan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo lebih banyak lagi”.



Gamabr 4. Dokumentasi saat Wawancara dengan Bapak Hamzah Folkano Haloho, selaku pelaku usaha Telor Asin, Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 11.24

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kelembagaan sangat membantu dalam proses pengembangan UKM namun untuk kelembagaan yang ikut berperan masih kurang. Hal ini diperkuat oleh Ibu Fransiska Noviyanti selaku pelaku usaha (Alvi Madu Murni Selandi/ Desa Selandi Lama).

“ Istilah kelembagaan bagi kami selaku pelaku usaha mungkin masih kurang memahami tapi yang kami tahu, kelembagaan cukup berperan dalam memfasilitasi seperti memberikan kegiatan, penyaluran bantuan. Mungkin akan lebih baiki jika kelembagaan yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo diperbanyak”.

Dari penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat Bapak Dester Barus, selaku pelaku usaha (Minuman Herbal Jahe Merah/ Desa Semangat).

“untuk kelembagaan yang berperan dalam UKM sudah memberikan dampak yang baik dengan adanya kelembagaan yang ikut dalam proses pengembangan UKM tentu kami selaku pelaku usaha sangat terbantu dan akan mampu bagaimana cara membuat UKM kami lebih baik lagi ”

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha diatas, bahwa pelaku usaha sudah menerima peran kelembagaan dalam pengembangan usahanya masing-masing, dan dengan adanya kelembagaan yang ikut memberikan fasilitasnya tentu akan sangat membantu para pelaku usaha.

2. Perlindungan Usaha

Perlindungan usaha menjadi satu hal yang penting bagi kelangsungan untuk usaha maupun pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan usaha yang diberikan tentu akan mensejahterakan para pelaku usaha, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mandira selaku pelaku usaha (Zhorenta/Kabanjahe).

“Perlindungan usaha yang saya terima dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo seperti pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), jadi menurutn saya perlindungan usaha yang saya terima sudah baik”.



Gambar 6. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Ayu Mandira Br Sembiring, selaku pelaku usaha Zhorenta / Obat Herbal , Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 11.47

Berdasarkan hasil wawancara diatas perlindungan usaha sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, perlindungan usaha yang ada akan menjamin bagaimana status usaha yang sedang dijalankan. Hal ini diperkuat oleh Ibu Ekaria Nainggolan selaku pelaku usaha (Tania Cake & Snack/ Samura).

“perlindungan yang saya terima dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabuppaten Karo seperti pengurusan ijin usaha , halal, hak paten, dan ijin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo”.

Dari penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat Ibu Nomiyaniti selaku pelaku usaha (Fashion Monza/Kabanjahe).

“perlindungan usaha yang kami terima dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo hanya

seperti pembuatan NIB, PIRT, menurut saya dalam hal perlindungan usaha pihak Dinas sudah optimal untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha”

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha diatas, untuk perlindungan usaha sangat dibutuhkan oleh para pelaku UKM, dengan adanya perlindungan usaha yang diberikan maka pelaku UKM akan lebih sejahtera atau lebih merasa aman jika sesuatu terjadi pada usaha mereka. Dengan ini Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sudah berhasil dalam memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha.

3. Akses Pembiayaan

Dalam menjalankan UKM tentu tidak akan luput dari masalah biaya ataupun materi untuk pendukung dalam kegiatan berusaha. Namun, kejadian yang dapat dilihat dari beberapa pelaku usaha masih banyak yang belum mendapatkan bantuan untuk hal pembiayaan, hal ini juga yang menyebabkan kendala berkembangnya UKM yang ada di Kabupaten Karo. Dapat dilihat dari jawaban wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitri Anita Girsang selaku pelaku usaha (Jl.Mimpin Tua, Sempajaya/Yuuk Shopping).

“Untuk hal pembiayaan saya belum menerima bantuan, maupun dalam bentuk barang ataupun bahan, mungkin juga karena jenis usaha yang saya jalankan masih berjumlah sedikit dan untuk daerah Kabupaten Karo belum menyediakan akses untuk jenis usaha saya”.



Gambar 7. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Fitri Anita Girsang, Selaku Pelaku

Usaha Bibit Bunga/ Yuuk Shopping, Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 14.01 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk akses pembiayaan tentu sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, namun dari jawaban yang diberikan terlihat bahwa untuk pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo masih terbilang minim. Hal ini diperkuat oleh Ibu Iona Br Tarigan selaku pelaku usaha (Tarigan Rumah Jait/Lingga).

“pembiayaan yang saya terima dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo adalah berupa alat-alat seperti usaha saya fashion di bidang menjahit, jadi yang saya terima berupa alat mesin jahit, untuk biaya langsung belum pernah saya terima.”

Dari penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat Ibu Siti Wahyuni, selaku pelaku usaha (Manisan Tomat/Jaranguda).

“pembiayaan yang saya terima dari Dinas untuk secara tunai atau modal belum ada, untuk pembiayaan tentu kami sangat membutuhkan hal tersebut, salah satu kekurangan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang kami lihat adalah hal tersebut. Keterbatasan biaya yang kami alami akan menghambat pengembangan usaha yang kami jalankan”.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha diatas, menerangkan bahwa pembiayaan langsung atau secara tunai belum pernah diterima oleh para pelaku usaha yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo namun bantuan yang mereka terima merupakan alat pendukung untuk menjalankan UKM yang mereka miliki. Keterbatasan yang secara khusus dalam bentuk akses pembiayaan akan sangat berpengaruh kepada perkembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo. Dari jawaban tersebut akan lebih baik jika bantuan secara tunai untuk keberlangsungan UKM diberikan kepada pelaku usaha, pihak Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Pembahasan

Pengembangan UKM

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo masih terbelang kurang ataupun belum baik, hal ini dapat dilihat dari proses pengembangan UKM diantaranya :

1. Dinas ketenagakerjaan belum berperan secara maksimal dalam upaya pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo. Pengembangan pada usaha yang dilakukan oleh peserta usaha sudah mampu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.
2. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah merasakan bahwa usaha yang mereka jalankan sudah berkembang, namun tetap ada kendala juga yang mereka alami pada saat menjalankan usaha, sehingga hal tersebut menjadi penghambat perkembangan usaha yang mereka jalankan,
3. Banyaknya pelaku usaha yang masih belum bisa fokus terhadap usaha yang sedang dijalankan sehingga perkembangan usaha yang terjadi pun sudah terhambat..

Pengembangan dalam UKM sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Umdiana, *et al* (2018) "Perkembangan usaha kecil menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha".

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha mengenai pengembangan usaha dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang terjadi pada UKM yang ada di Kabupaten Karo sudah baik, dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha akan sangat membantu proses pengembangan UKM.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan (Rani Yanti, 2020), "Peran Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pengembangan

di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM yang di kota Jambi semuanya sudah dilakukan seperti pelatihan-pelatihan, pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Kelembagaan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelembagaan yang ikut membantu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo dalam pengembangan UKM sudah memberikan fasilitas kepada pelaku usaha diantara lain :

1. Pelaku usaha sudah menerima aspek atau peran dari kelembagaan yang ikut membantu perkembangan usaha yang cukup penting bagi pelaku usaha.
2. Kelembagaan yang sudah ikut berperan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo membuat UKM yang ada semakin berkembang namun akan lebih baik jika kelembagaan yang ikut berperan jumlahnya lebih banyak.
3. Bantuan yang diberikan oleh kelembagaan kepada pelaku usaha sudah mampu membuat UKM lebih baik

Kelembagaan adalah hal yang penting bagi pelaku usaha, kelembagaan menjadi salah satu pendorong untuk berkembangnya UKM. Mardikanto (2010) dalam Bhimo Sukoco (2019) menyebutkan kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif akan dapat mendukung terselenggaranya Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan.

Dari hasil wawancara mengenai kelembagaan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan yang sudah ikut berperan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo berdampak baik kepada pelaku usaha, fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha juga sangat membantu keberhasilan UKM yang ada di Kabupaten Karo.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan Nine Septya Anggraini (2021) "Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil

Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian menunjukkan Bisnis kecil berhasil mengembangkan produknya sendiri melalui pemasaran untuk mempertahankan pertumbuhan usaha untuk tetap berkembang.

Perlindungan Usaha

Perlindungan usaha menjadi satu hal yang penting bagi kelangsungan untuk UKM maupun pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan usaha yang diberikan tentu akan memberikan dampak yang baik kepada pelaku usaha, dapat dilihat dari beberapa hal yang diberikan diantaranya :

1. Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo kepada pelaku usaha sangat membantu dalam pelaksanaan usaha seperti pembuatan NIB, PIRT dan lainnya.
2. Pelaku usaha sudah mendapatkan perlindungan yang dapat menjamin keberlangsungan dalam menjalankan usahanya.
3. Perlindungan usaha yang telah diterima oleh pelaku usaha membuat UKM yang mereka kelola lebih berjalan produktif tanpa merasa bahwa akan ada ancaman dalam poroses pengelolaannya.

Perlindungan usaha menjadi salah satu hal yang penting bagi pelaku usaha dan faktor yang mendukung keberlangsungan UKM. Budastra I Ketut (2020) menyebutkan perlindungan UKM sangat perlu dilakukan karena memiliki kapasitas ketahanan terhadap gangguan operasional yang relatif rendah, tapi memberikan pekerjaan bagi banyak penduduk baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja, 2 bagian yang dapat dilakukan yaitu Dukungan transisi media pemasaran *off-line* ke *online*, dan Bantuan sarana.

Dari hasil wawancara mengenai perlindungan usaha dapat disimpulkan bahwa perlindungan usaha yang sudah diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo kepada

pelaku usaha sudah baik, dari perlindungan yang telah diterima maka pelaku usaha sudah merasa lebih aman dan terjamin dalam melaksanakan proses pengelolaan usahanya, dan dengan adanya perlindungan usaha tersebut akan membuat UKM di Kabupaten Karo lebih berkembang.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan Sofiy Hasbiyyah 2018 “Strategi Pengembangan UMKM Yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas Dan Memberikan Alternatif Strategi yang Tepat Bagi Pengembangan UMKM Di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan Analisis faktor eksternal dan faktor internal dilakukan dengan 4 jenis strategi yang tepat dan dapat dijadikan sebagai alternatif strategi pengembangan bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas.

Akses Pembiayaan

Dalam menjalankan UKM tentu tidak akan luput dari masalah biaya ataupun modal sebagai pendukung dalam menjalankan usaha. Namun, kejadian yang dilihat dari beberapa pelaku usaha adalah pelaku usaha yang masih belum puas dengan bantuan pembiayaan yang diberikan dalam hal tersebut diantaranya :

1. Pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karo sudah menerima bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo namun belum berupa biaya atau modal.
2. Hanya ada beberapa pelaku UKM yang menerima bantuan seperti alat pendukung untuk menjalankan usaha, itu pun hanya kepada beberapa kategori UKM
3. Pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo sudah cukup membantu namun masih kurang optimal dalam upaya pengembangan UKM.

Pembiayaan dalam proses menjalankan usaha tentu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha tersebut, pembiayaan juga menjadi hal pokok dalam menjalankan usaha. Septia (2020:1) dalam Inovasi Keuangan Berbasis Teknologi Untuk Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM menyebutkan keterbatasan aksesibilitas pembiayaan mengakibatkan UKM mencari sumber pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan nonbank, mulai dari lembaga keuangan informal, seperti saudara dekat, tetangga, rekan bisnis, rentenir hingga koperasi, pegadaian dan lembaga pembiayaan lainnya.

Dari hasil wawancara mengenai akses pembiayaan kepada pelaku usaha maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang telah diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo sudah memberikan yang terbaik kepada pelaku usaha namun ada beberapa faktor pembiayaan yang masih belum optimal.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan Adibrata (2021) dengan judul Upaya Pengembangan UKM Dengan Memanfaatkan E-Commerce Taman Walet Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan dari penyuluhan *E-Commerce* yaitu meningkatkan branding serta keuntungan dalam proses produksi. Meningkatkan pangsa pasar karena jangkauannya yang luas tidak terikat waktu dan tempat dapat membuat produk kita lebih mudah dikenali, mengurangi biaya promosi pembuatan iklan cetak seperti brosur dan semisalnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1 . Pengembangan usaha yang terjadi pada pelaku UKM terkendala karena masih banyak pelaku usaha yang belum fokus terhadap usahanya sehingga usaha mereka sulit berkembang. Seperti pelaku usaha yang masih kurang peduli dengan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang diadakan.

2 . Kelembagaan yang ikut berperan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo sudah berperan dengan baik dalam memberikan fasilitas kepada pelaku usaha.

3 . Perlindungan Usaha sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha namun untuk perlindungan yang secara khusus yang ada di Kabupaten Karo untuk pelaku usaha sudah diterima dengan baik. Pelaku usaha sudah cukup puas dengan upaya perlindungan usaha yang diberikan.

4 . Para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Karo sudah menerima bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo namun masih belum optimal dalam hal pembiayaan secara tunai ataupun langsung.

Saran

1. Diharapkan agar Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo dapat memberikan dan memperhatikan dalam hal pembiayaan kepada para pelaku usaha agar pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo juga akan lebih meningkat.
2. Pihak Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo tetap mampu memberikan dukungan dan arahan dalam pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Karo.
3. Diharapkan kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan dan mampu menerima arahan atau pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito A, Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV Jejak.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2019. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Revika Aditama
- Asmin Erni Amriani, Andri Hendra Syam, "dkk", 2021. *Manajemen Pemasaran*

- (*Perspektif Digital Marketing*)
Bandung: CV Media Sains Indonesia
- Bhimo Sukoco Johan, 2019. *Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol:8, No:1. Halaman 15-21
- Budastra I Ketut. 2020. *Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial Untuk Penanganannya, Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Agrimansion. Vol:21, No:1. Halaman 48-57
- Dinas Ketenagakerjaan koperasi dan UKM Kabupaten Karo. *Daftar jumlah UKM yang Terdaftar Di Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM di Kabupaten Karo Tahun 2018-2021*.
- Dheasey Amboningtyas, 2018. *Pengembangan capacity Building Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Tugu, Semarang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol: 3, No: 2. Halaman 47-67
- Dodiet Aditya Setyawan, 2021. *Hipotesis dan Variabel Penelitian*. Surakarta: Tahta Media
- Effendi Syahril, Baru Harahap, 2019. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Baniis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batam*. Khazanah Ilmu Berazam. Vol:2, No:4. Halaman 689-701.
- Harini Cikik, 2020. *Strategi Pemasaran Kewirausahaan UMKM*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hasbiyyah S, 2018. *Strategi Pengembangan UMKM Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas*. Skripsi.
- Isa Muzakar, 2021. *Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Kinerja UKM Pangan*. Urecol: Seri Ekonomi dan Bisnis. Halaman 79-87.
- Jony, Sunday Ade Sitorus, Kharis Fadullah, Hana Bonoraja Purba, Edwin Basmar, Hasyim Mochamad Sugiarto, Mariana Simanjuntak, Sariyanto, 2021. *Usaha Kecil Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Kurniawan Puguh, 2020. *Strategi Pengembangan Pasar Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Mebel (Studi Kasus Pada Mebel Bapak Supar Desa Panggung Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis. Vol:7, No:1. Halaman 59-65.
- M. Azrul Tanjung, 2018. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Neumen W. Lawrence, 2018. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks Jakarta.
- Nurharyanto Aji, Betty Rosalina, Raya Yulia Saputri, Sukirman, Yopi Suganda, Moh. Sutoro, 2021. *Pembentukan SDM Kompetitif, Mandiri, Berkualitas dan Unggul, Serta Inovatif di Era Digitalisasi dan Kondisi Pandemi Covid-19*. Vol:3, No:1. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis. Halaman 18-27.
- Rizki Giovani, Aga, Amin Ma'ruf, Arsah Nurul Zahroh, Malwan, Wiwit Widyawarap Sari, 2021. *Upaya Pengembangan UKM Dengan Memanfaatkan E-Commerce Tama Walet Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten*. Adibrata Jurnal. Vol:2, No:1. Halaman 48-55.
- Saptia Yeni, dkk, 2020. *Inovasi Keuangan Berbasis Teknologi Untuk Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Suparno Eko Widodo, 2020. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PUSTAKA ELAJAR.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Umdiana, Nana, Neneng Sri Suprihatin, Kodriyah, 2018. *Pengembangan UKM Melalui Desain Produk Dan Kemampuan Bersaing*. Sumbadha. Vol:1, No:1. Halaman : 169-176.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Dejure. Vol:13, No:1. Halaman: 24-39.

Yanti Rani, Sissah, Embun Baining, Mellya, 2020. *Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi*. Skripsi Thesis. UIN Thana Saifuddin Jambi.